

## Bahan Diskusi:

## PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN YANG BERPERSPEKTIF KEADILAN (Sumberdaya Manusia Petani)

## **Dudung Darusman**

Disampaikan pada Seminar Mahasiswa Pertanian Indonesia di Bogor, 6 Maret 1997

Saya melihat dan berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan nasional maupun sektoral pertanian yang telah ada sampai akhir-akhir ini sudah dapat dianggap sangat memadai, untuk memungkinkan dicapainya peningkatan peran serta dan kesejahteraan para petani di tanah air Indonesia ini. Kebijakan harga, kebijakan pemasaran dan kebijakan struktural sudah memberikan peluang yang sangat luas. Kalaupun masih ada celah-celah untuk perbaikannya, maka kontribusi marjinal dari perbaikannya tersebut akan relatif kecil saja, sementara biaya per satuan kenaikan tersebut akan semakin besar.

Kelihatannya faktor paling lemah dalam pengembangan pertanian di tanah air ini adalah faktor sumberdaya manusianya yang terlibat dalam sektor pertanian, terutama para petaninya sendiri. Kelemahan yang dimaksud adalah dalam hal:

- 1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- 2. Penerapan manajemen yang efisien, baik manajemen produksi maupun perusahaan.

Kelemahan di kedua hal tersebut, telah membuat para petani tidak mampu menangkap berbagai peluang/kesempatan yang disediakan oleh berbagai kebijakan yang ada.

Sesungguhnya sesuatu yang kecil itu tidak selalu berarti lemah. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa yang kecil itu mampu berkembang menjadi kuat karena mampu menangkap peluang-peluang yang tersedia, akibat sumberdaya manusianya baik. Banyak sudah upaya-upaya berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian ini, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat petani yang berbudaya industri.

Namun berdasarkan akar-akar budaya yang dimiliki, penggeseran budaya petani pada generasi tua telah dirasakan sangat berat dan tidak bisa diharapkan terlalu besar. Oleh karena itu pemberdayaan petani dan pertanian di Indonesia ini harus didukung dan dibantu penuh oleh generasi baru yang lebih terdidik dan terampil. Generasi baru yang lebih terdidik dan terampil itu, khususnya para sarjana pertanian (dalam arti luas) harus mau masuk ke dalam lingkungan petani dan pertanian yang kecil dan terbelakang itu. Caranya mungkin dengan kembali mengembangkan dan mengusahakan pertanian milik orang tua/keluarganya, atau bekerja pada perusahaan agribisnis berskala tidak besar.

Tanpa penguatan kapasitas penguasaan iptek dan manajemen, melalui penguatan sumberdaya manusia pengelolanya, petani-petani tidak akan pernah mampu menangkap segala peluang yang diberikan. Penguasaan iptek dan manajemen dapat saja ditingkatkan melalui program penyuluhan. Namun penyuluhan bukanlah strategi yang terbaik, karena: (1) terpisah (tidak merupakan bagian integral) dari unit agribisnis-nya, sehingga kurang responsif terhadap kondisi kebutuhan dan biaya yang ada, dan (2) karena sifatnya sebagai bantuan dari luar maka cenderung tidak berkelanjutan

Sekedar tambahan, suatu ilustrasi bagaimana kualitas sumberdaya manusia petani, dapat saya amati pada sekian banyak rekan-rekan jemaah haji yang kebanyakan petani. Saya melihat beberapa sifat "counter productive" seperti : (1) miskin alternatif pemecahan masalah, (2) tidak bersungguh-sungguh memikirkan pemecahan masalah, (3) segera mencari jalan pintas, misalnya menyogok, dll., (4) rendahnya kerjasama dan pergiliran/antri, atau lebih mementingkan individu sekalipun harus merugikan pihak lain.

Rasanya akan sulit sekali atau kecil sekali harapan dapat memperbaiki sifatsifat negatif tersebut. Oleh karena itu segala upaya dan kebijakan pertanian dapat diharapkan mampu menghasilkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berperspektif keadilan apabila pelaku pengelolaan pertaniannya diisi oleh tenaga yang berpendidikan dan berketerampilan cukup tinggi/memadai.